

# DUNIA YANG DINAMIS: STUDI KASUS PARA PEKERJA INFORMAL DI KOTA BANDUNG

*Resmi Setia M.*<sup>1</sup>

*Untung Rahardjo.*<sup>2</sup>

## Abstract

THIS WRITING discusses on the life of informal urban workers, in relation to formal economic activities and rural life. A study on informal workers in the city of Bandung shows that most informal workers: (1) are involved in various production activities, formal and informal; (2) have strong relevancy with rural life, such as through remittances; and (3) have various demography characteristics and socio-economic household conditions. These various characteristics strengthen the assumption that informal urban economic condition is not the same with urban poor. These various discussions are placed in the context of national labor force change, increasingly dominated by informal workers.

## Pendahuluan

Studi-studi terdahulu mengenai kegiatan ekonomi informal di negara-negara berkembang, didominasi oleh studi yang bersifat makro dan terfokus pada aspek ekonomi dari kegiatan informal.<sup>3</sup> Sedangkan studi lainnya menekankan pentingnya peran dan fungsi institusi dalam proses negosiasi politik dan ekonomi para pelaku informal, baik dengan sesama pelaku, pemerintah,

dll.<sup>4</sup> Dari berbagai studi tersebut, hanya sedikit perhatian diberikan pada kehidupan para pelaku informal. Padahal pendekatan mikro ini dapat melengkapi studi yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik para pelaku dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga mereka. Pemahaman akan karakteristik pelaku informal ini dapat digunakan untuk menjelaskan keterlibatan mereka

<sup>1)</sup> Peneliti lepas pada Yayasan AKATIGA

<sup>2)</sup> Pedagang kaki lima di kota Bandung

<sup>3)</sup> Seperti yang diperlihatkan dalam tulisan Castells dan Portes 1989; Mazumdar 1991; Portes dan Schauffler 1993; Sethuraman 1991.

<sup>4)</sup> Di antaranya studi Bromley 1979; Cross 1998; Firdausy 1995; Handayani 2006; Pena 1999.

dalam kegiatan ekonomi informal perkotaan. Tulisan ini membahas kehidupan para pekerja informal perkotaan, terutama dalam kaitannya dengan sistem ekonomi formal dan kehidupan perdesaan. Pembahasan terhadap kehidupan para pekerja informal ini diletakkan dalam konteks perubahan struktur ketenagakerjaan nasional terkini.

### **Sekilas Kondisi Ketenagakerjaan Nasional**

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan Indonesia belum menunjukkan perbaikan signifikan. Tingkat pengangguran terbuka dalam tiga tahun terakhir memang menurun, dari 11,24 persen (2005) menjadi 10,28 persen (2006) dan 9,11 persen (2007), namun tetap lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu yang hanya mencapai 6,4 persen (BPS 2008; Faisal Basri dalam Kompas, 5 Mei 2008). Penurunan angka pengangguran terbuka ini sulit dijadikan indikator perbaikan ekonomi Indonesia, terutama ketika diiringi peningkatan

jumlah pengangguran terselubung (*underemployment*).<sup>5</sup> Pada tahun 2006–2007, angka pengangguran terselubung meningkat sebesar 1,27 juta orang, yakni dari 29,10 juta pada 2006, menjadi 30,37 juta orang pada 2007<sup>6</sup> (BPS 2008). Pada tahun-tahun mendatang, jumlah pengangguran terselubung diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan jumlah pengangguran terselubung dianggap oleh beberapa ahli ekonomi sebagai salah satu pertanda memburuknya perekonomian di Indonesia. Sehingga, orang terpaksa bekerja apa saja secara informal untuk mempertahankan tingkat pendapatan mereka (Kompas, 25 November 2002).

Dalam tiga dekade terakhir, jumlah pekerja informal di kota terus menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25 persen pada 1971, menjadi 36 persen pada 1980 dan 42 persen pada 1990.<sup>7</sup> Paska krisis moneter, jumlah pekerja informal melonjak melebihi 60 persen (1999) dan terus meningkat hingga 70 persen pada 2007.<sup>8</sup>

Peningkatan jumlah pekerja informal perkotaan terkait dengan

<sup>5)</sup> Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

<sup>6)</sup> Dari jumlah angkatan kerja Indonesia sebesar 106,39 juta orang (2006) dan 109,94 juta orang (2007) (BPS 2008)

<sup>7)</sup> Dikutip dari laporan Bappenas yang berjudul *Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan*, Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi 2003.

<sup>8)</sup> Diolah dari data BPS 2003 dan 2008.

berbagai persoalan mendasar, seperti tingginya ketimpangan pola kepemilikan tanah dan alih guna lahan, maraknya praktik korupsi dan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja, penguatan kekuasaan modal yang mendorong maraknya praktik desentralisasi produksi, dan minimnya tingkat upah buruh (lihat Breman 2001; Rachbini dan Hamid 1994).

Dalam berbagai pembahasan mengenai ekonomi informal, terdapat kecenderungan untuk menyamakan ekonomi informal dengan kegiatan kelompok miskin kota. Padahal tidak semua yang terlibat dalam kegiatan ini adalah orang miskin dan berpendidikan rendah (lihat Bromley 1979; Castells dan Portes 1989). Kegiatan ekonomi informal melibatkan orang yang berasal dari berbagai kelas sosial. Bagian di bawah ini coba memperlihatkan karakteristik para pekerja informal yang jarang mendapat perhatian.

### **Karakteristik Tak Umum Para Pekerja Informal**

Di negara-negara berkembang, sebagian besar pekerja informal terserap ke dalam sektor pertanian dan perdagangan. Di area perkotaan di Indonesia, khususnya, kegiatan ekonomi informal didominasi sektor perdagangan, transportasi, dan jasa, seperti pedagang kaki lima (PKL), pemulung, dan supir ojek. Studi-studi sebelumnya memperlihatkan, sebagian besar pelaku ekonomi informal tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah, berasal dari rumah tangga miskin, dan pendatang (lihat Firdausy 1995; Rachbini dan Hamid 1994; Sethuraman 1991). Hasil studi tim AKATIGA (2008) juga menunjukkan kecenderungan serupa. Namun beberapa kasus memperlihatkan karakteristik yang cukup berbeda, yaitu memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi dan bukan berasal dari kelompok rumah tangga termiskin. Seperti yang diperlihatkan dalam kotak kasus 1.

#### KOTAK KASUS 1

Mas<sup>9)</sup> (45), pedagang cincin batu ali di kawasan Cicadas dan pemilik warung kelontong di kawasan Cihampelas, meraih gelar sarjana hukum di salah satu universitas swasta di Kota Bandung pada tahun 1980-an. Ia berasal dari sebuah

<sup>9)</sup> Atas permintaan informan, nama disamarkan.

keluarga berkecukupan di Cirebon.

Aceng (31), pemilik dan pedagang pulsa dan VCD di kawasan Ciroyom, meraih gelar sarjana di Fakultas Syariah di sebuah universitas Islam di Kota Bandung. Ia pernah bekerja sebagai guru honorer di Garut. Dari hasil berjualan, ia bisa mengantongi keuntungan hingga Rp 3 juta/bulan.

Untung (38), pedagang baso tahu hokkie, menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di daerah asalnya, Cilacap. Ia lulus pada tahun 1991. Almarhum Ayah Untung, selama hidupnya bekerja sebagai prajurit TNI AD dan ibunya berprofesi sebagai bidan kampung.

Irman (33), pemilik dan pedagang sate padang di daerah Kiaracundang, menyelesaikan pendidikan SMA di Padang, Sumatera Barat. Dari hasil berdagang, ia bisa mengantongi keuntungan bersih setidaknya Rp 1,5 juta/bulan.

Ade<sup>10</sup> (33), tukang ojek di kawasan Sekeloa, drop out dari jurusan hukum di salah satu universitas negeri ternama di Kota Bandung. Ia adalah penduduk asli Kota Bandung.

Wawan (30), pemotong rambut dan pemain musik, *drop out* dari jurusan administrasi negara di salah satu universitas swasta di Kota Bandung. Ayahnya memiliki kedudukan cukup tinggi di sebuah perusahaan negara di Kota Bandung.

Desprang (28), pedagang DVD bajakan di kawasan BIP, meraih ijazah dari sebuah sekolah teknik mesin di Kota Bandung. Selama berdagang, ia kerap mendapat tambahan modal dari orang tua yang masih bekerja di sebuah perusahaan swasta.

Yadi (46), pemilik kios minuman dan rokok di sekitar RS Borromeus, Bandung, menyelesaikan pendidikan kejuruan di sebuah sekolah menengah kejuruan (setingkat SMA) di Kota Bandung. Ia berasal dari Yogyakarta tapi sudah tercatat sebagai warga Kota Bandung.

Amin (44), pemilik dan penjual aksesoris motor di Jalan Dipati Ukur, meraih gelar sarjana dari jurusan Perdata Islam di sebuah universitas Islam di Kota Bandung. Ia memiliki dua pekerja. Keuntungan bersih dari kegiatan berdagangnya mencapai sekitar Rp 4 juta/bulan.

Hamzah (46), pemilik sekaligus pedagang alat-alat listrik di Jalan Astana Anyar, meraih gelar sarjana elektro dari sebuah universitas swasta ternama di Kota Bandung. Ia adalah mantan karyawan PT DI (Dirgantara Indonesia).

Sumber: catatan lapangan tim peneliti AKATIGA,<sup>11</sup> Juli–Agustus 2008; catatan riwayat hidup Untung Rahardjo Agustus 2008.

<sup>10)</sup> Atas permintaan informan, nama disamarkan.

<sup>11)</sup> Terdiri dari Resmi Setia, Deni Mukbar, Verry Firmansyah, dan Gilang Surawijaya.

Berbagai kasus tersebut menggambarkan keragaman karakteristik pekerja informal, dan menunjukkan bahwa ekonomi informal tidak hanya menjadi kegiatan orang miskin kota. Menurut Castells dan Portes (1989), meskipun kegiatan ekonomi informal didominasi kelompok miskin, namun proses-proses produksi di dalamnya melibatkan pelaku dari berbagai kelas sosial.

Selain itu, keterlibatan lebih banyak pelaku informal yang berpendidikan cukup tinggi, bisa menjadi pertanda kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Industri formal<sup>12</sup> baik swasta maupun negeri, yang biasanya menjadi tujuan para pencari kerja yang berpendidikan tinggi, tampaknya sudah tidak mampu menyerap limpahan tenaga kerja semacam ini. Kondisi ini mendorong tingginya nilai industri formal, memicu tingkat kompetisi antar pencari kerja, dan melemahkan posisi tawar mereka dalam pasar tenaga kerja.

Bahkan di masa-masa krisis, banyak pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri karena

kondisi kerja yang kurang layak dan upah yang minim. Banyak di antara mereka yang kemudian terlibat dalam kerja-kerja informal. Selain itu, industri formal juga seringkali sulit dijadikan satu-satunya sumber mata pencaharian karena tingkat upah yang rendah. Sehingga, banyak pekerja formal yang memiliki usaha sampingan, seperti usaha kredit barang, membuka warung, atau berjualan makanan ringan (Resmi Setia 2004).

Berbagai hal di atas memperlihatkan salah satu contoh keterkaitan kegiatan ekonomi formal dan informal. Hubungan ketergantungan dan keterkaitan terus-menerus antara ekonomi formal–informal juga bisa dilihat dalam proses produksi, distribusi, kemampuan ekonomi informal menyediakan buruh fleksibel bagi industri formal, dan posisi ekonomi informal sebagai penyuplai barang murah bagi buruh-buruh di industri formal (Bromley 1979; Castells dan Portes 1989; Moser 1979; Rachbini dan Hamid 1994). Penjelasan mengenai hubungan antara kedua sistem ekonomi ini akan diuraikan secara lebih detail dalam bagian berikut ini.

<sup>12)</sup> Industri formal diartikan sebagai kegiatan usaha/perusahaan yang tercatat, menerapkan aturan kerja, sistem pengupahan dan jaminan sosial yang sesuai dengan hukum perburuhan yang berlaku.

## Artikulasi Hubungan Formal-Informal

Pembagian kegiatan ekonomi ke dalam dua kategori, yaitu formal-informal, telah banyak dikritik karena dibangun di atas asumsi bahwa kedua sektor ini terpisah dan mandiri. Sebuah kritikan datang dari Caroline N. Moser (1979), melalui tulisannya yang berjudul *Informal Sector or Petty Commodity Production: Dualism or Dependence in Urban Development?* Moser melihat, model dualisme ekonomi tidak mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan produktif berkelanjutan dan keterkaitan serta hubungan ketergantungan antara sistem produksi dan distribusi. Pendekatan *petty commodity production* melihat hubungan antara perusahaan besar (formal) dan kecil (informal) sebagai hubungan yang eksploitatif karena keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil sangat terbatas, sementara mereka harus menanggung risiko karena statusnya yang kerap dianggap ilegal. Sebagai contoh, dalam kasus perdagangan kaki lima, banyak PKL yang tidak lebih merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan-perusahaan yang berstatus formal (Bromley 1979; Rachbini dan Hamid 1994). Mereka menjadi ujung tombak pemasaran produk-produk yang berasal dari

perusahaan besar, seperti minuman dan makanan ringan, rokok, dan media. Hal ini diperkuat oleh temuan tim LP3ES (dalam Rachbini dan Hamid 1994, 102-103) bahwa produk yang paling banyak dijual oleh para pedagang informal adalah produk-produk yang berasal dari industri formal. Namun para PKL tersebut harus menanggung risiko kerugian sendiri akibat terkena aksi penertiban yang kerap dilakukan pemerintah kota. Dalam pengertian ini, hubungan formal-informal selain memiliki hubungan fungsional juga mengandung unsur eksploitasi (lihat Bromley 1979; Moser 1979; Wirutomo dalam Rachbini dan Hamid 1994).

Kritik lain juga dikemukakan oleh Jan Breman (2001). Ia menyoroti informalisasi sistem tenaga kerja dalam industri-industri formal yang mengaburkan dikotomi pasar tenaga kerja. Dalam sistem semacam ini, perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai sektor formal semakin sering membuat perjanjian kerja informal dengan pekerjanya. Sebagian besar pekerja tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Selain itu, pengalihan sebagian proses produksi dari perusahaan besar (formal) kepada industri-industri rumahan (informal)

yang mempekerjakan tenaga-tenaga kerja harian lepas atau borongan, juga semakin marak dilakukan. Desentralisasi produksi ini sangat efektif untuk mengurangi ongkos produksi sekaligus menekan kekuatan organisasi buruh (Breman 2001; Piore dan Sabel 1984 dalam Castells dan Portes 1989, 23).

Lebih jauh, artikulasi hubungan formal-informal tidak hanya terbatas pada ranah produksi dan distribusi, namun juga dalam dukungan yang diberikan ekonomi informal terhadap ekonomi formal berupa suplai produk-produk murah bagi para bu-

ruh/pekerja di industri formal. Pada awal tahun 1990-an, diperkirakan sekitar 1,5 juta dari dua juta pekerja formal di Jakarta mengonsumsi produk-produk dari sektor informal (Rachbini dan Hamid 1994, 92). Selain itu, banyak pekerja informal merupakan limbah dari industri-industri formal atau melakukan kegiatan ekonomi formal-informal sekaligus. Dengan kata lain, kedua corak kegiatan ini mewarnai kehidupan para pekerja informal, seperti yang digambarkan dalam dua kasus PKL berikut ini.

## KOTAK KASUS 2

Sejak masa sekolah hingga sekarang, Untung (38) telah terlibat dalam berbagai pekerjaan, mulai dari kuli bangunan, tukang ojek tembak, buruh restoran, buruh pabrik, staf administrasi di peternakan ayam, pengurus partai, pedagang roti tawar, hingga pedagang baso tahu. Pekerjaan formal yang pernah digelutinya adalah buruh pabrik (1992-1994) dan staf administrasi di peternakan ayam (1994-1999). Meskipun Untung memiliki ijazah SMA dan sertifikat kursus akuntansi, tapi ia tidak merasa keberatan melakukan berbagai pekerjaan asalkan bisa menghasilkan uang. Ia tidak mau hidup menganggur atau menyusahkan orang tua.

Ketika masih bekerja di sebuah pabrik tekstil di Cimindi-Cimahi, Untung pernah mengalami kecelakaan kerja terkena alat press kain. Namun, ia tidak mendapatkan kompensasi apa pun dari pihak manajemen pabrik. Kemudian ia berkenalan dengan seorang buruh yang juga aktivis perburuhan. Aktivis tersebut mengajak Untung bergabung dalam kelompok diskusi dan pelatihan-pelatihan perburuhan. Berbagai kegiatan tersebut, membuka wawasan Untung akan hak-hak buruh dan memberinya rasa percaya diri. Berbagai manfaat yang diperoleh dari diskusi-diskusi tersebut, memberi keberanian pada Untung untuk bergabung dalam sebuah organisasi buruh non-SPSI. Selama bekerja di pabrik, Untung juga mengikuti kursus manajemen akuntansi dan Bahasa Prancis. Ia menyisihkan sebagian upahnya untuk membiayai kursus tersebut. Gagasan mengikuti kursus diperolehnya dari teman-teman di organisasi buruh. Setelah menamatkan kursus, Untung mengundurkan diri dari

pabrik dan kembali ke desanya di Cilacap.

Selama menganggur Untung mendapatkan tawaran mengisikan data pada buku rapor sekolah dengan imbalan secukupnya. Hingga akhirnya, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dari tetangga sekampungnya, sebagai staf administrasi di sebuah peternakan besar di Cilacap. Penghasilan yang diperolehnya saat itu cukup besar dan stabil. Kondisi ini memungkinkannya membeli sebuah rumah secara kredit. Namun sebelum sempat dilunasi, ia terpaksa harus menjual rumah tersebut karena mengalami PHK. Peternakan tempatnya bekerja bangkrut akibat krisis moneter 1997. Menguatnya nilai tukar dollar mendorong kenaikan harga pakan ternak. Kondisi ini berdampak pada menurunnya jumlah peternak yang dibina dari 100 menjadi tinggal lima peternak.

Selama empat tahun terakhir, Untung bekerja sebagai pedagang baso tahu di Bandung. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu sekitar 12 jam untuk berjualan. Ia berjualan secara berkeliling dan menetap di tempat-tempat tertentu. Keterlibatannya dalam kegiatan ini diawali ajakan tetangga sekampung. Ia diperkenalkan tetangganya tersebut kepada pemilik usaha baso tahu yang juga berasal dari kampung yang sama. Ia bekerja kepada seorang majikan (pemilik) yang berperan sebagai penyedia baso tahu, gerobak, dan perlengkapannya, seperti piring, sendok/garpu, dan kompor. Sang Majikan juga memberinya tempat untuk tinggal. Namun ia harus berbagi tempat tinggal dengan 15 pedagang baso tahu lain yang memiliki posisi sama seperti dirinya.

Sumber: catatan riwayat hidup Untung Rahardjo (2008)

### KOTAK KASUS 3

Sejak masih sekolah, Yadi (46) sudah terbiasa membantu orang tuanya yang menjadi pedagang rokok, makanan kecil, dan minuman di depan sebuah rumah sakit ternama di Kota Bandung. Orang tua Yadi merintis usaha perdagangan ini sejak tahun 1977. Mereka merangkap pekerjaan sebagai pegawai rumah sakit sekaligus pedagang. Setelah pensiun, mereka fokus pada kegiatan perdagangan tersebut.

Setamat sekolah teknik mesin, Yadi sempat terlibat dalam berbagai pekerjaan, seperti pekerja bengkel, cleaning service, pegawai konstruksi, buruh pabrik di peleburan logam di Cimindi, Cimahi, dan pabrik gitar di Ujungberung, Bandung. Saat bekerja di pabrik gitar, akhir tahun 1980-an, ia hanya mampu bertahan hingga satu minggu karena upah yang diterimanya hanya Rp 1000/hari. Pekerjaan terlama yang pernah dilakukannya adalah menjadi buruh peleburan logam. Setelah tiga tahun bekerja di pabrik logam, ia memutuskan mengundurkan diri dan bekerja di pabrik lain dengan harapan mendapatkan upah lebih tinggi. Ternyata upah yang diterimanya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Selama bekerja di pabrik, Yadi juga sering menggantikan orang tuanya menjaga kios. Kegiatan ini dilakukannya saat libur atau bekerja pagi.

Pada tahun 1989, Yadi memilih meneruskan usaha kios milik orang tuanya. Kedua



orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk berdagang karena sudah mulai sakit-sakitan. Dari hasil simpanannya selama bekerja di pabrik, Yadi menambah modal usaha agar bisa lebih berkembang. Ia memperoleh barang dagangan dari toko grosir tak jauh dari rumahnya. Hasil yang diperoleh Yadi dari berdagang cukup besar, bahkan melebihi penghasilannya saat menjadi buruh pabrik. Dari pekerjaannya sebagai pedagang, ia mampu menyekolahkan ke-4 anaknya. Anak tertuanya yang baru lulus STM, telah mulai bekerja di sebuah pabrik di Cimahi. Sementara itu, istri Yadi membuka kursus menjahit di rumah dan memiliki 30 murid. Tempat kursus ini, merupakan anak cabang dari kursus menjahit YANI. Lima persen dari pendapatan harus disetorkan ke kantor pusat kursus YANI. Penghasilan bersih yang diperoleh dari membuka kursus ini, digunakan untuk membantu membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-sehari.

Sumber: catatan lapangan Resmi Setia, 13 Agustus 2008.

Kedua kasus di atas memiliki perbedaan dan persamaan baik yang terkait dalam hubungan produksi maupun distribusi. Secara umum persamaan terjadi dalam hal keterlibatan mereka sebelumnya dalam kegiatan ekonomi formal, sebagai buruh pabrik, dan memiliki derajat ketergantungan tertentu terhadap industri formal maupun informal. Sedangkan perbedaannya mencakup status kepemilikan usaha, cara dan alat pemasaran, status pekerjaan, hubungan produksi, dan asal produk/ input (lihat tabel 1).

TABEL 1  
PERBEDAAN MODEL PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DI  
DUA KASUS

| Aspek perbedaan   | Untung                  | Yadi                                 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Kepemilikan usaha | Bukan pemilik           | Pemilik                              |
| Cara pemasaran    | Berkeliling dan menetap | Menetap                              |
| Alat pemasaran    | Gerobak                 | Kios                                 |
| Status pekerjaan  | Pekerja                 | Pekerja sekaligus pemilik            |
| Hubungan produksi | Tergantung              | Mandiri dan tergantung <sup>13</sup> |
| Asal produk/input | Industri rumahan        | Industri besar                       |

<sup>13)</sup> Mandiri dalam menjalankan usaha dan tergantung dalam hal input produk yang diperdagangkan.

Dari uraian di atas tampaknya Yadi lebih memiliki keterkaitan dengan ekonomi formal karena ia berperan sebagai distributor produk-produk yang berasal dari perusahaan besar. Sedangkan Untung relatif memiliki sedikit keterkaitan dengan ekonomi formal, karena produk yang diperdagangkan berasal dari industri rumahan (informal) yang tidak terdaftar. Meskipun demikian, posisi Yadi sebagai pemilik sekaligus pekerja ternyata lebih memudahkannya dalam mengelola usaha dan mengakumulasi modal dibandingkan Untung yang berstatus sebagai pekerja. Menjadi pekerja dari industri informal cukup menyulitkan Untung dalam mengakumulasi modal karena minimnya keuntungan yang diperoleh. Kondisi ini juga kerap kali menyulitkannya dalam membiayai kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya yang tinggal di kampung.

Seperti banyak pendatang lainnya, Untung bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Keterbatasan pilihan pekerjaan di desa, mendorongnya pindah ke kota. Namun di masa-masa menganggur atau menunggu pekerjaan baru, Untung lebih memilih kembali ke desa dan mengerjakan berbagai kerja serabutan di desa. Hubungan desa-kota ini akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

### Dinamika Hubungan Desa-Kota

Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, secara umum, para pengamat ekonomi informal perkotaan menyepakati adanya keterkaitan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi informal perkotaan dengan tingginya tingkat migrasi desa-kota. Hernando De Soto menyatakan, migrasi besar-besaran dari desa ke kota menye-

Tabel 2

Jumlah Penduduk Miskin Desa-Kota 1998 – 2007

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Juta) |      |
|-------|-------------------------------|------|
|       | Kota                          | Desa |
| 1998  | 17,6                          | 31,9 |
| 1999  | 12,4                          | 25,1 |
| 2000  | 12,3                          | 26,4 |
| 2001  | 8,6                           | 29,3 |
| 2002  | 13,3                          | 25,1 |
| 2003  | 12,2                          | 25,1 |
| 2004  | 11,4                          | 24,8 |
| 2005  | 12,4                          | 22,7 |
| 2006  | 14,5                          | 24,8 |
| 2007  | 13,6                          | 23,6 |

diakan massa bagi berkembangnya ekonomi informal perkotaan (dikutip dari Portes and Schauflier 1993). Migrasi desa-kota terkait dengan tingginya angka kemiskinan di desa seperti yang diperlihatkan dalam tabel 2 di bawah ini.

Seperti yang telah dibahas dalam berbagai studi, tingginya tingkat kemiskinan di desa, terkait adanya ketimpangan pola kepemilikan lahan dan terbatasnya sumber daya yang bisa diakses. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong migrasi desa-kota. Sebaliknya, tekanan keras di kota juga tidak jarang memaksa para migran untuk kembali ke daerah asalnya. Dengan kata lain, desa-kota memiliki faktor pendorong sekaligus penarik. Maman (34), pedagang aksesoris fashion di Jalan Sukajadi, Bandung, menceritakan bahwa saat ada operasi penertiban terhadap pedagang jalanan, ia memutuskan pulang kampung ke Kuningan. Setelah dua bulan, ia kembali ke Bandung dan berdagang di tempat semula. Selama di kampung, ia kembali bertani dan berternak.<sup>14</sup> Hal serupa juga dialami Untung (38). Saat menganggur ia memutuskan kembali ke desanya di Cilacap untuk melaku-

kan berbagai pekerjaan serabutan, hingga ada pihak yang memberinya informasi mengenai lowongan pekerjaan di kota.<sup>15</sup> Selama bekerja di kota, Untung menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya di kampung. Ia kerap kali harus berdagang keliling hingga lebih dari 12 jam per hari agar bisa mengirim uang pada keluarganya, atau membawa uang saat pulang kampung. Apalagi, anak tertuanya sudah mulai sekolah.

Kasus lain memperlihatkan bahwa, pekerja informal perkotaan yang masih memiliki dan mengelola lahan di desa akan kembali ke desa secara berkala terutama pada musim panen. Mereka akan kembali ke kota dengan membawa sebagian hasil panen untuk konsumsi sehari-hari. Subsidi dari desa tersebut bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya pengeluaran selama di kota. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan materi tidak hanya mengalir dari kota ke desa tapi juga sebaliknya.

Terdapat berbagai bentuk dukungan yang diberikan desa ke kota maupun sebaliknya, baik berupa materi dan non-materi. Bentuk dukungan materi telah dijelaskan di atas, se-

<sup>14</sup>) Catatan lapangan Resmi Setia, 19 Agustus 2008.

<sup>15</sup>) Catatan riwayat hidup Untung Rahardjo, 2008.

dangkan dukungan non-materi bisa berupa pengasuhan anak. Selama kedua orang tua bekerja di kota, hak pengasuhan anak kerap diserahkan pada keluarga di kampung. Seperti yang dialami oleh Dewi (bukan nama sebenarnya), pelayan toko asal Jawa Tengah. Setahun setelah menikah dengan seorang pedagang kaki lima asal Bandung, ia dikaruniai seorang anak perempuan. Ia dan suami, memutuskan untuk menitipkan anak mereka kepada keluarga Dewi di Jawa Tengah. Selain karena biaya hidup di desa dianggap lebih rendah, ia juga merasa lebih nyaman melimpahkan pengurusan anak kepada keluarga terdekatnya.<sup>16</sup>

Bentuk dukungan non-materi lainnya, berupa akses terhadap pekerjaan di kota. Para pekerja informal pendatang yang telah cukup berhasil biasanya akan mengajak anggota keluarga atau tetangga di desa untuk bekerja di kota. Mereka akan memberikan informasi mengenai berbagai jenis pekerjaan yang tersedia, yang biasanya sama atau serupa dengan jenis pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Untung (38) mendapatkan informasi tentang pekerjaannya sekarang sebagai tukang baso tahu dari tetangga sekampungnya di Ci-

lacap. Tetangga tersebut juga yang memperkenalkannya pada pemilik usaha baso tahu tersebut (lihat kotak kasus 2).

Bentuk hubungan desa-kota yang sering mendapat sorotan adalah kiriman uang (remittance). Banyak kasus memperlihatkan pentingnya kiriman uang dari kota bagi kehidupan ekonomi perdesaan. Dana yang diterima oleh keluarga di desa, dibelanjakan di desa sehingga bisa menggerakkan kegiatan ekonomi perdesaan (Hetler 1989 dikutip dalam Rachbini dan Hamid 1994). Bahkan tidak sedikit yang berhasil membuka usaha warung, berternak kecil-kecilan, dan membeli sepetak tanah di desa. Selain itu, kiriman uang juga kerap dipergunakan untuk membiayai sekolah, yang kemudian mendorong tingkat pendidikan di area perdesaan. Berbagai uraian tersebut, menunjukkan sebagian dimensi hubungan desa-kota yang mewarnai kehidupan para pekerja informal perkotaan.

## Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan beberapa hal yang penting dicermati dalam pembahasan ekonomi informal perkotaan:

1. Para pelaku ekonomi informal

<sup>16)</sup> Catatan lapangan Resmi Setia, 9 Juli 2008.

- perkotaan memiliki karakteristik beragam dan tidak hanya melibatkan kelompok miskin perkotaan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi informal tidak bisa disamakan dengan kegiatan ekonomi orang miskin.
2. Kegiatan ekonomi informal memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan ekonomi formal, baik dari sisi produksi dan distribusi, maupun hubungan kerja para pelakunya.
  3. Kegiatan ekonomi informal-formal selain memiliki hubungan saling ketergantungan/fungsional juga mengandung unsur eksploitasi.
  4. Keberadaan para pekerja informal, terutama pendatang, memiliki kontribusi penting terhadap kehidupan ekonomi perdesaan dan tingkat pendidikan penduduknya.
  5. Kebijakan yang diarahkan terhadap para pelaku ekonomi informal perkotaan harus mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi formal, permasalahan di area perdesaan, dan keragaman karakteristik para pelaku ekonomi informal.
  6. Pertumbuhan jumlah pekerja informal, terutama yang terkait dengan praktik informalisasi tenaga kerja, menekankan pentingnya pengorganisasian meluas yang tidak hanya mencakup buruh yang bekerja secara formal juga informal. Pengorganisasian pekerja informal juga cukup krusial mengingat keberadaan mereka yang rentan dan tidak memiliki perlindungan dan jaminan sosial apa pun.

## Daftar Pustaka

- BPS (2008). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta, BPS.
- Breman, Jan (2001). "An Informalised Labour System: End of Labour Market Dualism." *Economic and Political Weekly* 36 (52): 4808-4821.
- Bromley, R. (1979). "Introduction-The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing?" *The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1031-1032.
- Bromley, R. (1979). "Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called 'Urban Informal Sector': The Street Traders of Cali, Colombia." *The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1161-1172.
- Castells, Manuel dan Alejandro Portes (1989). "World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy." *The Informal Economy: Studies in Advance and Less Developed Countries*. Alejandro Portes, Manuel Castells, and Lauren A. Benton. London, The Johns Hopkins University Press: 11-37.
- Cross, John C. (1998). "Co-optation, Competition, and Resistance: State and Street Vendors in Mexico City." *Latin American Perspectives* 25 (2): 41-61.
- Firdausy, C. M. (1995). "Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima." *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. C. M. Firdausy. Jakarta, Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.: 139-156.
- Handayani, Suci. (2006). *Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif: Sebuah Pengalaman di Kota Solo*. Solo, KOMPIP dan The Ford Foundation.
- Mazumdar, D. (1991). "Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris Terhadap Data dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga." *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 109-137.
- Moser, C. N. (1979). "Informal Sector or Petty Commodity Production: Dualism or Dependence in Urban Development?" *The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1041-1064.
- Pena, S. (1999). "Informal Markets: Street Vendors in Mexico City." *Habitat International* 23(3): 363-372.
- Portes, Alejandro dan Richard Schauffler (1993). "Competing Perspectives on The Latin American Informal Sector." *Population and Development Review* 19 (1): 33-60.
- Rachbini, D. J. and A. Hamid (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Invulsi Gelombang Kedua*. Jakarta, LP3ES.

- Resmi Setia (2004). *Gali Tutup Lubang Itu Biasa: Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Masa ke Masa*. Bandung, Yayasan AKATIGA.
- Sethuraman, S. V. (1991). "*Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang*." Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 90-108.

#### Surat Kabar

- Kompas, 5 Mei 2008. "*Analisis Ekonomi: Nestapa Pekerja*." Faisal Basri.
- Kompas, 25 November 2002. "*Analisis Ekonomi: Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita*." M. Chatib Basri.

#### Dokumen Tidak Dipublikasikan

- Catatan lapangan tim peneliti AKATIGA, Juli – Agustus 2008.
- Catatan riwayat hidup Untung Rahardjo, Agustus 2008.
- Resmi Setia dan Deni Mukbar (2008). *Draft Laporan Studi Pemetaan PKL di Kota Bandung*. Bandung, Yayasan AKATIGA.